

KORAN
DIGITAL

PERTAMA
& GRATIS

KORAN SULSEL

TERPERCAYA & TERDEPAN

.COM

EDISI RABU

10 SEPTEMBER 2025



LANTIK 9 PEJABAT BARU, WALI KOTA MAKASSAR PASTIKAN JABATAN TAK BISA DIBELI



GUBERNUR SULSEL USULKAN
RP 233 MILIAR UNTUK BANGUN KEMBALI
GEDUNG DPRD YANG DIBAKAR MASSA
BACA HALAMAN ... 3



Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin usai melantik dan mengambil sumpah jabatan dari sembilan orang pejabat tinggi pratama melalui mekanisme lelang jabatan di Makassar, Selasa (9/9/2025).

LANTIK 9 PEJABAT BARU, WALI KOTA MAKASSAR PASTIKAN JABATAN TAK BISA DIBELI

MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham melantik dan mengambil sumpah sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) untuk mengisi jabatan kosong hasil mekanisme lelang jabatan.

“Alhamdulillah, seluruh pejabat eselon II di Kota Makassar kini sudah terisi secara definitif. Saya berharap mereka semua mampu menjalankan amanah dengan baik dan fokus pada pelayanan masyarakat,” ujar Munafri, Selasa.

Dalam kesempatan itu, Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan komitmennya menjaga integritas birokrasi. Ia memastikan seluruh proses pengisian jabatan berjalan transparan, objektif, dan bebas dari praktik jual beli jabatan.

“Jabatan di pemerintahan ada-

lah amanah sekaligus tanggung jawab besar kepada masyarakat, bukan ruang untuk kepentingan pribadi. Selama saya ada di sini, tidak boleh ada yang namanya transaksional dalam jabatan. Kita ingin orang-orang yang berkemampuan mendapat tempat yang tepat, bukan karena transaksi. Itu janji saya,” tegasnya.

Appi juga menepis anggapan pelantikan dilakukan terburu-buru karena pengumuman baru disampaikan sehari sebelumnya. “Kalau bisa cepat, kenapa harus ditunda. Justru dengan cepat, para pejabat bisa segera berkonsolidasi di tempat barunya masing-masing. Logikanya sederhana, tidak mungkin kita lakukan ini kalau aturan-aturan dari BKN tidak terpenuhi,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelantikan pejabat eselon II akan berdampak

pada pergeseran di level bawah, termasuk jabatan sekretaris OPD maupun lurah yang otomatis kosong setelah pejabatnya naik. Pemkot akan segera mengisi jabatan kosong itu melalui seleksi internal agar roda birokrasi tetap berjalan maksimal.

Dengan pelantikan ini, struktur birokrasi Pemkot Makassar semakin lengkap. Selanjutnya, pengisian jabatan sekretaris hingga lurah akan segera dilakukan demi menjaga kualitas pelayanan publik.

Terkait adanya dua pejabat yang bergeser posisi, yakni di Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan (Damkarmat) serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Munafri menegaskan keputusan tersebut diambil berdasarkan scoring tim penilai. (ant/KS)

GUBERNUR SULSEL USULKAN RP 233 MILIAR UNTUK BANGUN KEMBALI GEDUNG DPRD YANG DIBAKAR MASSA

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan anggaran Rp233 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun kembali gedung DPRD SulseL yang hangus terbakar saat unjuk rasa berujung ricuh pada Sabtu (30/8).

“Kita usulkan sesuai dengan hasil hitungan kita dan sudah diajukan ke Kementerian PU. Dari kementerian, beritanya tahun ini dialokasikan. Inshaallah sesuai apa yang disampaikan,” ujar Gubernur SulseL Andi Sudirman Sulaiman usai menghadiri rapat paripurna DPRD SulseL di Aula Kantor Dinas BMBK Provinsi SulseL, Senin.

Ia menegaskan, Pemprov SulseL hanya sebatas mengajukan nilai kebutuhan, sementara ke-

pastian jumlah bantuan yang akan disetujui pemerintah pusat masih menunggu balasan resmi.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut kerugian akibat kerusakan fasilitas pemerintahan di berbagai daerah usai kerusuhan mencapai sekitar Rp900 miliar. Namun setelah perhitungan ulang, nilainya membengkak hingga Rp1 triliun.

“Itu masih sebatas berita kita baca. Kita tunggu saja hasil balasan suratnya. Sudah dihitung semua, itu di-cover kementerian. Kita ajukan Rp233 miliar,” jelas Andi Sudirman.

Ketua DPRD SulseL Andi Rachmatika Dewi (Cicu) menambahkan pihaknya telah menggelar

konsultasi dengan pemerintah pusat, termasuk Balai Cipta Karya dan Ditjen Otda Kemendagri, untuk membahas anggaran pembangunan kembali.

“Inshaallah dalam waktu dekat dari Kementerian PU akan melakukan survei perhitungan pembiayaan dan teknis pembangunan lainnya,” ujarnya di sela rapat paripurna APBD Perubahan 2025.

Sambil menunggu pembangunan baru, DPRD SulseL akan menggunakan Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) sebagai kantor sementara. Proses pembangunan kembali gedung DPRD diperkirakan membutuhkan waktu paling cepat satu tahun. (ant/KS)



Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman

WAGUB SULSEL: APBD PERUBAHAN 2025 HARUS TRANSPARAN DAN TEPAT SASARAN

MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulsel untuk menjaga transparansi serta memastikan penggunaan APBD Perubahan 2025 tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Setiap rupiah anggaran harus memberi manfaat nyata bagi rakyat Sulawesi Selatan,” tegasnya saat membacakan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sulsel atas Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2025 dalam rapat paripurna di Kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi Sulsel, Selasa.

Menanggapi pandangan Fraksi Nasdem dan Fraksi Harapan, Fatmawati menegaskan pemerintah tidak akan menambab beban masyarakat. Upaya intensifikasi dilakukan melalui digitalisasi layanan, integrasi data pajak, dan optimalisasi aset.

Fraksi PPP yang menilai target pendapatan Rp10,4 triliun terlalu optimis, dijawab dengan strategi penagihan kendaraan tidak dafta- ar ulang, pengawasan berbasis digital, serta integrasi data wajib pajak. “Target itu bukan seka- dar harapan, melainkan disertai langkah implementatif,” katanya.

Untuk belanja daerah, pemer- intah menegaskan pembatasan belanja seremonial. Anggaran diarahkan pada sektor prioritas yang langsung dirasakan mas- yarakat. Di bidang infrastruktur, langkah strategis diarahkan pada penanganan banjir kawasan Mamminasata melalui normal- isasi sungai dan peluncuran transportasi massal Trans Sulsel. Sejak beroperasi pada Juli 2025, layanan Trans Sulsel telah me- layani 110 ribu penumpang hing- ga akhir Agustus.

Menanggapi Fraksi Golkar, Fat- mawati menyampaikan bahwa digitalisasi transaksi pajak daer- ah sudah mencapai 100 persen

non-tunai, memberi transparansi sekaligus mendorong pertum- buhan ekonomi. Sementara itu, terkait sorotan Fraksi PKS atas kenaikan target pajak kendaraan bermotor dan penurunan BBNKB akibat tren kendaraan listrik, pe- merintah menyiapkan regulasi adaptif serta memperkuat pen- gawasan lapangan. “Kami realistis, tapi tetap optimis dengan lang- kah antisipatif,” jelasnya.

Menjawab Fraksi Demokrat, Fatmawati merinci PAD 2025 se- besar Rp5,57 triliun bersumber dari pajak daerah, retribusi, pen- gelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain PAD yang sah. Optimal- isasi peran BUMD juga menjadi bagian penting strategi pening- katan pendapatan daerah.

Dengan langkah tersebut, Pemprov Sulsel menegaskan bahwa APBD Perubahan 2025 akan dikelola secara akuntabel dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan publik secara nyata. (ant/KS)



Wagub Sulsel Fatmawati Rusdi membacakan jawaban Gubernur terkait pandangan umum fraksi di Makassar, Senin,(8/9/2025).



DAMKAR MAKASSAR–MAROS PERKUAT SINERGI TANGANI KEBAKARAN LINTAS WILAYAH

MAKASSAR – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Sulawesi Selatan memfasilitasi kerja sama antara Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar dan Kabupaten Maros dalam penanganan kebakaran serta ke-daruratan lintas wilayah.

Kerja sama ini meliputi pertukaran data kebakaran, koordinasi penanganan darurat di wilayah perbatasan Makassar–Maros, serta dukungan sarana-prasarana, termasuk akses jalur tol melalui kemitraan dengan pihak swasta.

Kepala Bidang Linmas dan Damkar Satpol PP Provinsi Sulsel, Fahlevi, menyampaikan arahan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang menekankan pentingnya sinergi lintas daerah. “Keselamatan masyarakat adalah

prioritas utama. Sinergi Makassar dan Maros ini sejalan dengan upaya pemerintah provinsi memperkuat ketangguhan daerah, apalagi kawasan perbatasan memiliki aktivitas ekonomi dan mobilitas yang padat,” ujarnya di Makassar, Selasa.

Fahlevi menambahkan kolaborasi ini menjadi langkah strategis meningkatkan kesiapsiagaan daerah. “Makassar dan Maros adalah kawasan dengan mobilitas tinggi, termasuk aktivitas di bandara maupun jalur tol, sehingga dibutuhkan koordinasi yang solid, terutama untuk menjangkau kawasan yang sulit diakses Damkar Kabupaten Maros seperti Pate'ne,” jelasnya.

Perwakilan Damkar Kota Makassar, Jamaluddin, menilai kerja sama ini akan mempercepat

respon penanganan kebakaran. “Kami ingin memastikan operasi lapangan lebih efektif, terutama di area perbatasan yang sering membutuhkan bantuan cepat,” katanya.

Ia menambahkan dukungan teknologi dan jaringan dari sektor swasta akan memperkuat sistem komunikasi serta distribusi logistik saat keadaan darurat.

Bagi masyarakat di perbatasan Makassar–Maros, sinergi ini diyakini akan meningkatkan perlindungan dan mempercepat respon kebakaran. Risiko kerugian jiwa maupun harta dapat ditekan, sementara masyarakat yang beraktivitas di area padat mobilitas seperti bandara, jalur tol, dan kawasan industri akan merasakan manfaat keamanan yang lebih kuat. (ant/KS)

DPRD SULSEL GUNAKAN KANTOR BMBK SEMENTARA BAHAS APBD PERUBAHAN 2025

MAKASSAR – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi menyampaikan bahwa Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) di Makassar masih dimanfaatkan sebagai kantor sementara untuk menyelesaikan pembahasan sekaligus pengesahan APBD Perubahan 2025.

“Sejauh ini kita di sini dulu, kalau pun ada perkembangan ke depannya kita akan tepati gedung yang lain, itu kita akan pikirkan bersama. Tapi untuk sekarang ini kita di sini dulu,” ujarnya di sela rapat paripurna APBD Perubahan 2025, Selasa.

Menurutnya, kantor BMBK cukup representatif digunakan untuk rapat-rapat kedewanan karena tersedia ruang komisi, fraksi, pimpinan, sekretariat dewan, hingga aula untuk sidang paripurna. Meski belum sepenuhnya maksimal, fasilitas yang ada sudah memungkinkan anggota DPRD bekerja.

“Artinya, kalau untuk kami

teman-teman DPRD selama bisa digunakan, selama representatif, saya pikir tidak ada persoalan tentang fasilitas, tapi yang penting bisa bekerja maksimal,” jelas politisi yang akrab disapa Cicu ini.

Ia mengapresiasi Pemprov Sulsel yang memfasilitasi ruang sementara pascapembakaran gedung DPRD. “Sebenarnya kami bersyukur, bahwa di waktu yang tidak terlalu lama kita sudah bisa memiliki gedung, khususnya ruang paripurna untuk kita gunakan dalam kegiatan kedewanan karena memang sangat mendesak,” ucapnya.

Cicu menegaskan, DPRD tidak mempermasalahkan lokasi, karena yang utama adalah fungsi dan tugas dewan tetap berjalan maksimal, terutama dalam pembahasan APBD Perubahan 2025 yang sangat ditunggu masyarakat.

Ia menilai kantor dinas yang dipinjamkan sudah cukup baik, strategis, dan aman. Hanya sepekan setelah peristiwa pem-

bakaran gedung DPRD, ruang paripurna sudah bisa difungsikan kembali. “Kita dalam posisi pinjam pakai sementara, selama gedung kami dalam masa rehabilitasi dan pembangunan ulang, kantor ini masih digunakan sementara,” tambahnya.

Agenda pembahasan APBD Perubahan 2025 sendiri berlangsung maraton sejak pagi hingga malam. Sidang pertama pukul 10.00–12.00 Wita membahas penjelasan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengenai Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2025. Dilanjutkan agenda kedua pukul 13.00–15.00 Wita berupa pandangan umum fraksi, serta agenda ketiga pukul 15.30–18.00 Wita mendengarkan jawaban Gubernur atas pandangan fraksi.

Sebelumnya, Gubernur Andi Sudirman memaparkan target pendapatan daerah dalam Ranperda Perubahan APBD 2025 sebesar lebih dari Rp10,4 triliun. (ant/KS)



Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi



Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto. (ANTARA/Darwin Fatir)

POLDA SULSEL DIGUGAT RP 800 MILIAR TERKAIT KERUSUHAN DAN PEMBAKARAN DPRD

MAKASSAR – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan digugat secara perdata senilai Rp800 miliar oleh warga Makassar, Muhammad Sulhadrianto Agus, melalui kuasa hukumnya Muallim Bahar. Gugatan ini berkaitan dengan dugaan kelalaian aparat dalam pengamanan hingga terjadi kerusuhan yang berujung pada pembakaran gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulsel pada 29–30 Agustus 2025, yang menimbulkan korban jiwa.

“Kita hargai upaya-upaya itu (gugatan) karena semua punya hak. Tapi, perlu saya sampaikan bahwa kepolisian sudah berusaha maksimal dan dengan penuh pertimbangan,” kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, kepada wartawan, Selasa.

Ia menegaskan, pasca-kerusuhan pihak kepolisian bekerja keras mengusut dalang peristiwa tersebut dan telah menangkap 32 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pem-

bakaran dan perusakan fasilitas pemerintahan. “Kalau memang ada upaya hukum, tentu kepolisian, Polda Sulsel juga berusaha dengan upaya-upaya hukum,” tambahnya.

Gugatan resmi dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Makassar pada Senin (8/9). Menurut kuasa hukum penggugat, gugatan ini diajukan karena pola pengamanan yang seharusnya dilakukan polisi dianggap tidak berjalan. Muallim menyebutkan pembakaran gedung DPRD Makassar pada Jumat malam (29/8) yang berlanjut ke DPRD Sulsel pada Sabtu dini hari (30/8) seharusnya bisa dicegah jika aparat menjalankan fungsi pengamanan dan intelijen secara maksimal.

“Ini soal pengamanan unjuk rasa, mengakibatkan terbakarnya dua kantor DPRD, tiga orang meninggal dunia, dan beberapa lainnya luka. Siapa yang bertanggung jawab?,” tegasnya.

Ia menilai aparat tidak terli-

hat mencegah atau menghalau massa saat peristiwa berlangsung, bahkan pos polisi ikut dibakar. Penetapan tersangka baru dilakukan setelah kejadian. “Dalam gugatan, kami nilai kepolisian lalai. Kami mengurai kerugian materil sebesar Rp800 miliar. Hitungan ini jelas, dan kami akan buktikan di pengadilan. Bila menang seluruhnya akan disumbangkan untuk pembangunan kantor dan korban,” ujarnya.

Menanggapi alasan kepolisian yang menyebut kekurangan personel dengan risiko tinggi bila diturunkan di tengah massa, Muallim menilai argumentasi itu lemah. “Kalau sasarannya polisi, tentu massa akan menyerang Polrestabes atau Polda, bukan gedung DPRD,” katanya.

Kasus gugatan besar ini dipastikan menjadi sorotan publik karena menyangkut tanggung jawab institusi kepolisian dalam mengamankan fasilitas vital negara dan melindungi warga saat kerusuhan terjadi. (ant/KS)

GRATIS
TANPA IURAN

EDISI RABU
10 SEP 2025



MENKEU PURBAYA HADAPI "PR" MEYAKINKAN INVESTOR DAN REFORMASI PAJAK

BACA HALAMAN 2



**KPK DUGA RIDWAN KAMIL
TERIMA UANG DARI
KASUS KORUPSI BANK BJB**



Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) bersama pejabat lama Sri Mulyani Indrawati (kiri) menyapa wartawan usai serah terima jabatan, di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc

MENKEU PURBAYA HADAPI "PR" MEYAKINKAN INVESTOR DAN REFORMASI PAJAK

JAKARTA - Pengamat pajak Gabriel Kurniawan berpendapat Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memiliki pekerjaan rumah untuk meyakinkan investor global sekaligus mengatasi tantangan penerimaan pajak.

Dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (9/9/2025), Gabriel mengatakan mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati memiliki rekam jejak yang mumpuni sebagai ekonom maupun Direktur Pelaksana Bank Dunia, yang membuat investor menaruh kepercayaan ke Indonesia.

Kini, Purbaya yang menggantikan posisi Sri Mulyani, perlu melanjutkan kepercayaan itu.

"Jadi, Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru perlu membuktikan dan menjaga iklim usaha tetap positif, termasuk meyakinkan atau membangun kembali dari awal kepercayaan publik dan investor global," ujar Gabriel.

Di sisi lain, Purbaya menerima jabatan Menkeu ketika penerimaan negara dalam kondisi yang cukup menantang.

Purbaya sebelumnya telah

menyatakan tidak akan merombak kebijakan fiskal Sri Mulyani dan berfokus mengoptimalkan mesin-mesin perekonomian yang ada.

Namun, menurut Gabriela, kebijakan perpajakan perlu dievaluasi.

"Kebijakan perpajakan belakangan ini menurut saya masih memberatkan masyarakat, di mana masih ada opsi yang lebih bijak terkait penerimaan negara," kata dia lagi.

Sebagai contoh, pemerintah bisa menaikkan batas pengusaha kena pajak (PKP) dibandingkan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

Opsi lainnya, pemerintah dapat menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dan menambah basis wajib pajak agar iklim investasi lebih bersaing.

Dia berharap kebijakan fiskal yang akan diambil oleh Purbaya nantinya dapat mewakili kebutuhan masyarakat.

"Kiranya di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya bisa lebih

transparan dan lebih adil untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terikat kepentingan politik tertentu," ujar Gabriel.

Sebelumnya, Purbaya menyampaikan keyakinannya bahwa dia memiliki kapasitas yang memadai untuk menjabat sebagai Menkeu.

Terkait tanggapan pasar, Purbaya mengatakan dirinya memiliki rekam jejak panjang di pasar modal, sehingga optimistis kepercayaan investor akan segera kembali.

"Mungkin pasar enggak tahu saya orang pasar. Saya di pasar sejak tahun 2000, 15 tahun lebih," katanya.

Sementara mengenai pajak, ia berencana mendongkrak rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang dia lihat bergerak konstan, atau tidak mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

"Tax ratio kan konstan, tax per PDB (produk domestik bruto). Kalau tidak bisa berubah dalam waktu dekat, untuk meningkatkan pajaknya, ya kita percepat pertumbuhan ekonominya," ujar dia lagi. (ANT/KN)



Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Ridwan Kamil kembali menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh selebgram Lisa Mariana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

KPK DUGA RIDWAN KAMIL TERIMA UANG DARI KASUS KORUPSI BANK BJB

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Ridwan Kamil menerima uang dari kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021–2023 saat menjabat Gubernur Jawa Barat.

"Kemudian bagaimana saudara RK bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat," ujar Pelaksana Tugas Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Cuntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/9).

Asep menjelaskan Ridwan Kamil saat menjabat Gubernur Jabar diduga meminta dana non-bujeter dari komisaris maupun direktur utama di Bank BJB.

"Bank Jabar ini (Bank BJB, red.),

salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan nonbujeter. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu," katanya.

Berdasarkan laman Bank BJB, Pemerintah Provinsi Jabar merupakan pemegang saham terbanyak dengan kepemilikan 38,52 persen.

Dalam perkara dugaan korupsi Bank BJB itu, penyidik KPK pada 13 Maret 2025 telah menetapkan lima orang tersangka, yang pada tahun perkara menjabat sebagai berikut, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH).

Selain itu, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspres Suhendrik (SUH), dan Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp222 miliar.

Kemudian, pada 10 Maret 2025, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di Bank BJB, dan turut menyita sepeda motor hingga mobil dari penggeledahan tersebut.

Hingga Rabu (10/9), tercatat sudah 184 hari Ridwan Kamil belum dipanggil oleh KPK setelah penggeledahan tersebut. (ANT/KN)



Pelaksana Tugas Deputy Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/9/2025). ANTARA/Rio Feisal

KPK SEBUT PEJABAT KEMENAG DAPAT JATAH DALAM KASUS DUGAAN KORUPSI KUOTA HAJI

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pejabat Kementerian Agama di tiap tingkatan mendapatkan bagian atau jatah pada kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

"Kami ketahui bahwa masing-masing tingkatan ini, masing-masing orang ini, ya kemudian mendapat bagiannya sendiri-sendiri," ujar Pelaksana Tugas Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/9).

Oleh sebab itu, kata Asep, KPK sedang mengumpulkan uang-uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut, termasuk yang sudah menjadi aset, seperti rumah maupun kendaraan, untuk dilakukan penyitaan.

Asep menyampaikan pernyataan tersebut untuk menjelaskan penyitaan dua rumah dari aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal Penyeleng-

garan Haji dan Umrah Kementerian Agama dengan total nilai sekitar Rp6,5 miliar terkait kasus dugaan korupsi kuota haji.

KPK menduga aliran uang terkait kasus korupsi kuota haji tersebut mengalir secara berjenjang, yakni melalui orang kepercayaan, kerabat, hingga staf ahli pejabat Kemenag.

Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

Pada 11 Agustus 2025, KPK

mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kegagalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Titik pusat utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler. (ANT/KN)



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (9/9/2025). ANTARA/Fathur Rochman

AIRLANGGA: PELEMAHAN IHSG USAI RESHUFFLE KABINET HANYA BERSIFAT SEMENTARA

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melemah setelah adanya perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih bersifat sementara.

"Ini kan temporary. Kita lihat situasi yang berkembang," kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (9/9/2025), selepas mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Airlangga mengajak publik mengikuti situasi yang berkembang. Dia pun meyakini fundamental ekonomi Indonesia masih kuat.

"Tentu kita lihat lagi nanti ke depannya," kata Airlangga.

IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali ditutup melemah saat penutupan pasar Selasa sore, setelah pada pagi harinya juga dibuka melemah. IHSG ditutup melemah 138,24 poin atau

1,78 persen ke posisi 7.628,61. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 13,66 poin atau 1,74 persen ke posisi 769,93.

Sementara itu saat pasar dibuka, IHSG juga masih menempati zona merah, setelah sehari sebelumnya (8/9) juga ditutup melemah.

Sentimen negatif pasar itu bermula sejak Presiden Prabowo Subianto melantik menteri keuangan (menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa, menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Senin (8/9/2025) sore.

Selepas dilantik, Purbaya menilai sentimen pasar yang negatif itu biasa terjadi. Namun, dia meyakini publik dirinya telah cukup berpengalaman menghadapi situasi semacam itu.

"IHSG anjlok biasa, mungkin (investor, red.) takut, tetapi kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar. Jadi, saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi," kata Purbaya merespons pertanyaan mengenai

IHSG yang anjlok saat penutupan pasar sore ini saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Purbaya kemudian mengungkapkan optimismenya dalam waktu seminggu sampai dua minggu ke depan IHSG bakal rebound kembali ke zona hijau. "Dalam seminggu, 2 minggu pasti akan balik," ujar Purbaya.

Dalam kesempatan terpisah, Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Selasa, menilai respons pasar yang masih negatif itu karena mereka masih menantikan kebijakan Menkeu Purbaya.

"Pelaku pasar menantikan langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait arah kebijakan fiskal yang berkualitas, agar kebijakan berjalan secara konsisten dan kualitas sinergi komunikasi dengan otoritas kebijakan moneter, sehingga dapat mempertahankan kepercayaan pasar," demikian isi kajian dari Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas. (ANT/KN)



Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono memberikan keterangan pers usai menjemput jenazah Zetro Leonardo Purba, staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lima, yang meninggal akibat ditembak oleh orang tak dikenal (OTK) di Peru. ANTARA/Azmi Samsul Maarif

MENLU SUGIONO PASTIKAN HAK PENDIDIKAN ANAK MENDIANG ZETRO

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono berkomitmen untuk memberikan jaminan hak pendidikan kepada anak-anak almarhum Zetro Leonardo Purba, staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lima, yang meninggal akibat ditembak oleh orang tak dikenal di Peru pekan lalu. "Keluarga yang engkau tinggalkan (almarhum Zetro), akan kami urus dan kami rawat dengan sebaik-baiknya," kata Sugiono di Tangerang, Selasa. Ia mengatakan kepastian penanganan kesejahteraan keluarga melalui perawatan, baik itu yang didapat istri maupun anak-anak almarhum Zetro Leonardo Purba akan dijamin oleh pihaknya.

"Selamat jalan Zetro, saudara kami, menghadap lah dengan tenang. Kami akan meneruskan apa yang menjadi perjuanganmu," ucapnya. Sugiono mengungkapkan peristiwa memilukan yang dialami mendiang Zetro juga menjadi sebuah luka dalam bagi Kementerian Luar Negeri, sebagaimana hal yang sama dialami oleh pihak keluar-

ga, yaitu kesedihan mendalam atas kepergiannya. Oleh karenanya, pemerintah berkomitmen untuk bisa menyelesaikan dan memberikan kepastian hukum dalam penanganan kasus yang mengakibatkan kematian terhadap almarhum. Selain itu, pemerintah akan terus koordinasi dalam mengawal persoalan tersebut bersama Pemerintah Peru. "Kami juga menyampaikan komitmen kami untuk bisa menyelesaikan urusan ini dengan sejelas-jelasnya," ungkapnya. Dalam kesempatan itu, Menlu mendoakan mendiang Zetro Leonardo diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta ketabahan. "Kita doakan tenang berada di samping Tuhan Yang Maha Kuasa, tempat kita semua akan kembali. Kami melepas kepergian saudara kita dengan penuh duka, namun kita semua yakin beliau sudah berada di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa," tutur dia. Sementara itu, pihak keluarga almarhum

Zetro, Tiopan Purba mengucapkan terima kasih kepada pemerintah beserta keluarga besar Kementerian Luar Negeri atas perhatian dalam memfasilitasi pemulangan jenazah Zetro ke Tanah Air.

Keluarga juga mengapresiasi langkah Menlu Sugiono untuk mau bertanggung jawab dalam memberikan jaminan terhadap anak-anak yang ditinggalkan mendiang Zetro. "Kami sangat bangga atas ungkapan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk siap memberikan tanggung jawab kepada anak-anak dengan memberikan pendidikan setinggi-tingginya, mudah-mudahan ini betul-betul diwujudkan," katanya. Pihaknya percaya bahwa Pemerintah Indonesia akan mengawal terus proses penyelidikan yang masih dilakukan otoritas Peru. "Kami sangat percaya pemerintah dalam hal ini Menteri Luar Negeri akan mengusut tuntas. Bapak katakan tadi seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya, kami amat sangat percaya Bapak Menteri," kata dia. (ANT/KN)



Arsip Foto - Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua Tengah. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/kye/15

FREEPORT HENTIKAN SEMENTARA TAMBANG BAWAH TANAH, 7 PEKERJA TERJEBAK LONGSOR

JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) menghentikan sementara operasional penambangan di area tambang bawah tanah (underground) di kawasan Grasberg, Tembagapura, Mimika, Papua Tengah, akibat longsor yang terjadi sejak Senin (8/9) malam.

"Operasional penambangan telah dihentikan sementara untuk memprioritaskan pembersihan jalur akses dan evakuasi yang aman bagi tujuh pekerja kontraktor tersebut," ujar VP Corporate Communications Freeport Indonesia Katri Krisnati, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Katri menjelaskan bahwa pada Senin (8/9), sekitar pukul 22.00 WIT di Papua, Indonesia, terjadi aliran material basah dalam jumlah yang besar di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave. Material basah (wetmuck) diduga berasal dari area panel

GBC.

Insiden tersebut menyebabkan akses ke area tertentu di tambang tertutup, membatasi rute evakuasi untuk tujuh pekerja.

Katri menyampaikan bahwa lokasi para pekerja yang terjebak telah diketahui dan mereka diyakini aman. Saat ini, kru sedang berupaya membersihkan akses untuk evakuasi yang aman dan cepat.

"Bersamaan dengan itu, kegiatan penyediaan kebutuhan bagi para pekerja yang terdampak sedang dilakukan. Seluruh pekerja lainnya dipastikan aman," kata Katri.

Di dalam area tambang bawah tanah PTFI di kawasan Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, selalu terdapat fasilitas tempat berlindung (chamber) bagi para pekerja jika terjadi situasi yang membahayakan.

Chamber merupakan fasilitas darurat di tambang bawah

tanah yang dilengkapi suplai udara bersih, logistik, dan sarana komunikasi untuk menjamin keselamatan pekerja saat terjadi situasi darurat, seperti kebakaran, runtutan, atau paparan gas beracun.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kapolsek Tembagapura Iptu Firman yang dihubungi dari Timika, Selasa, mengatakan jajarannya masih terus melakukan koordinasi dengan pihak manajemen PTFI untuk segera mengevakuasi tujuh karyawan yang terjebak dalam area tambang bawah tanah tersebut.

"Informasi yang kami terima dari petugas pengamanan internal PT Freeport ada tujuh orang yang terjebak. Kejadiannya sejak tadi malam jam 22.00 WIT. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa, semoga semuanya selamat dan segera dievakuasi," kata Firman. (ANT/KN)



Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.

MUTU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERJAMIN, SEMUA PAUD DI BERAU KANTONGI IZIN

BERAU – Persoalan izin operasional yang sempat membayangi sejumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Berau akhirnya tuntas. Kini, seluruh PAUD di 13 kecamatan resmi memiliki legalitas yang sah.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyebut capaian ini sebagai langkah penting untuk memastikan setiap anak memperoleh pendidikan yang layak sejak dini.

“Legalitas bukan sekadar formalitas, tapi jaminan bahwa setiap anak di Berau bisa mengenyam pendidikan yang bermutu,” ujarnya.

Dijelaskannya, dengan kepastian izin tersebut, pemerintah

daerah dapat menyalurkan bantuan, pembinaan, hingga fasilitas penunjang secara tepat sasaran. Tanpa legalitas, lembaga pendidikan sebelumnya tidak bisa terdaftar dalam sistem sehingga berpotensi terhambat dalam menerima program bantuan.

Ia berharap keberhasilan ini dapat dirasakan hingga pelosok pesisir dan pedalaman, sehingga tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena kendala administrasi.

“Kami ingin menjadikan pendidikan anak usia dini sebagai pondasi utama pembangunan sumber daya manusia berkualitas di Kabupaten Berau,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Be-

rau, Mardiatul Idalisah, menegaskan bahwa tahun ini menjadi tonggak bersejarah karena 100 persen PAUD sudah terdata resmi.

“Ini memberi kepastian bagi orang tua sekaligus pengelola lembaga dalam memperoleh anggaran operasional, peningkatan sarana, hingga pembinaan tenaga pendidik,” jelasnya.

Ia menambahkan, izin operasional PAUD juga terkait erat dengan program wajib belajar satu tahun pra-sekolah sebelum masuk SD.

“Semakin jelas legalitasnya, semakin kuat juga jaminan mutu pendidikan di tingkat paling dasar,” pungkasnya. (adv/srn/set)



Suasan pengaman Dugaan Eksploitasi terhadap Anak di Bawah Umur di Kukar (Istimewa)

SATPOL PP KUKAR KEMBALI AMANKAN DUGAAN EKSPLOITASI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

TENGGARONG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mengamankan kasus dugaan eksploitasi anak. Setelah pada Senin (8/9/2025) malam mengamankan keluarga asal Balikpapan yang mempekerjakan anak sebagai pedagang asongan di Tenggarong. Tidak sampai 24 jam berselang Satpol PP kembali mengamankan seorang ibu bersama anak-anaknya yang melakukan praktik serupa.

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kukar, Awang Indra, mengatakan tindakan ini berawal dari laporan masyarakat. Dari hasil pemeriksaan, anak-anak yang masih berusia sekolah tersebut diminta membantu ibunya berjualan di jalanan.

"Di Kukar ada Perda Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sebagai penegak perda, Satpol PP memproses, mendata, lalu melanjutkan kasus ini ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)," ungkap Awang, Selasa (9/9/2025).

Ia menjelaskan, keluarga ini tercatat berdomisili sementara di Kukar, namun KTP mereka masih dari luar Kalimantan. Dari keterangan anak, sang ayah sedang terjerat kasus hukum sehingga hanya ibunya yang kini mengurus mereka.

Awang menegaskan, Satpol PP tidak hanya menasar kasus eksploitasi anak untuk berjualan, tetapi juga fenomena lain seperti pengamen punk, manusia silver, hingga badut yang mempekerjakan anak. "Semua itu akan jadi sasaran penertiban, karena Kukar ditetapkan sebagai zona bebas pekerja anak," tambahnya.

Satpol PP juga memastikan akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta kecamatan setempat, terutama terkait administrasi kependudukan keluarga tersebut.

Sementara itu, perwakilan DP3A Kukar, Farida, menyampaikan apresiasi kepada Satpol PP atas langkah cepat men-

amankan kasus ini. Menurutnya, eksploitasi anak tidak hanya melanggar perda, tetapi juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.

"Anak-anak ini seharusnya bersekolah, bukan ikut berjualan dari pagi hingga malam. Hak mereka harus dipenuhi. Orang tua masih kuat bekerja, jadi seharusnya tidak melibatkan anak," tegas Farida.

Ia menambahkan, persoalan administrasi kependudukan keluarga tersebut juga perlu segera diselesaikan agar pemerintah daerah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran. "Kalau status domisili jelas, pemerintah lebih mudah membantu. Karena siapapun dia, selama warga Indonesia, pasti kita upayakan perlindungan," lanjutnya.

DP3A mencatat, kasus serupa kerap terjadi di Kukar dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan sehari sebelumnya, Satpol PP juga sudah mengamankan keluarga lain dengan modus serupa.

Farida berharap penertiban ini menjadi peringatan agar praktik serupa tidak terulang. "Harapan



: Sepasang suami istri yang diamankan Satpol PP Kukar beserta anak-anaknya yang diduga di eksploitasi (Istimewa)

SEPASANG SUAMI ISTRI ASAL BALIKPAPAN DIAMANKAN SATPOL PP KARENA DIDUGA EKSPLOITASI ANAK

TENGGARONG – Sepasang suami istri asal Balikpapan diamankan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutai Kartanegara (Kukar) pada Senin (8/9/2025) malam. Keduanya diduga mengeksploitasi anak di bawah umur untuk berjualan asongan di Tenggarong.

Kasus ini terungkap setelah laporan warga masuk melalui aplikasi Satpol PP Siaga 24 Jam. Warga melaporkan adanya indikasi anak-anak dipaksa berjualan, yang pada akhirnya lebih sering meminta belas kasihan pembeli, yang diduga menjadi modus baru untuk mengemis.

“Kami melakukan tindakan karena ada indikasi eksploitasi anak di bawah umur. Mereka disuruh mungkin berjualan, tapi ujung-ujungnya minta-minta,”

jelas Kasatpol PP Kukar, Arfan Boma Pratama, melalui Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD), Rasidi, saat dikonfirmasi Selasa (9/9/2025).

Rasidi menambahkan, orang tua yang diamankan pihaknya tersebut memiliki lima anak, tiga di antaranya dibawa ke Tenggarong. Mereka mengaku kesulitan berusaha di tempat asalnya karena banyak saingan, sehingga memutuskan pindah dari Balikpapan ke Tenggarong melalui Samarinda.

“Kami di Tenggarong melarang praktik ini. Perda Kukar Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perda Nomor 5 Tahun 2015 terkait pengemis jelas melarang eksploitasi anak,” tegas Rasidi.

Tindakan Satpol PP dilakukan dengan pembinaan dan teguran,

bukan penahanan. “Kami melarang mereka kembali melakukan kegiatan serupa di Tenggarong. Anak-anak yang dikerjakan tiga orang itu semua anak kandungnya,” tambah Rasidi.

Satpol PP Kukar juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan praktik serupa melalui aplikasi Siaga 24 Jam jika ada yang memanfaatkan anak-anak untuk meminta sumbangan atau mengganggu ketertiban umum.

“Kami menghimbau masyarakat untuk segera melapor melalui aplikasi Siaga 24 jam jika menemukan aktivitas yang melanggar Trantibum di Kukar, Khususnya di Tenggarong,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor :



Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani (Ady/MKG)

APBD PERUBAHAN KUKAR DIPERKIRAKAN RP11,6 TRILIUN

TENGGARONG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 Kutai Kartanegara (Kukar) diproyeksikan senilai Rp11,6 triliun. Jumlah ini sedikit berkurang dari proyeksi awal sebesar Rp12 triliun, namun tetap menjadi instrumen vital untuk memastikan hak-hak masyarakat terjamin.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa pengurangan sekitar Rp300 hingga Rp400 miliar bukan berarti mengurangi prioritas. Justru APBD Perubahan diarahkan lebih fokus, efisien, dan menyasar kebutuhan mendesak masyarakat.

"APBD Perubahan ini sudah melalui proses pergeseran, efisiensi, dan rasionalisasi. Termasuk menghitung beban utang, baik dari Pilkada maupun proyek-

proyek sebelumnya. Semuanya harus segera dituntaskan karena waktu kita terbatas," jelas Ahmad Yani, Selasa (9/9/2025).

Ia menegaskan, DPRD akan mengawal ketat agar Rp11,6 triliun anggaran daerah benar-benar digunakan tepat sasaran. Hak-hak tenaga pendidik, tenaga medis, hingga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) masuk dalam prioritas utama.

"Semua hak masyarakat harus jelas terbayarkan tanpa ada pemotongan. Beasiswa, tunjangan guru, insentif dokter, bantuan untuk nelayan dan petani, semuanya masuk dalam APBD Perubahan ini," tegasnya.

Ahmad Yani menyebut, pengurangan anggaran dilakukan sesuai arahan pemerintah pusat.

Meski lebih kecil dari APBD murni, nilainya tetap dianggap besar dan cukup untuk menopang berbagai kebutuhan publik.

"Walau awalnya Rp12 triliun, kita harus realistis mengikuti aturan pusat. Tapi DPR tetap konsisten mengawal agar anggaran yang ada bisa memberi manfaat maksimal," katanya.

Lebih lanjut, ia memastikan DPRD Kukar tidak hanya fokus pada angka, melainkan juga pada realisasi. Jangan sampai masih ada proyek mangkrak atau utang yang dibiarkan menumpuk.

"Yang terpenting, masyarakat bisa merasakan langsung manfaat Rp11,6 triliun ini, bukan hanya sekadar angka di atas kertas," pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor :